CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

MENANAMKAN NILAI INTERGRITAS GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Syifa Jihan Nisya, Radhitya Ardi Wijaya, M. Nabil Altamis. HR
Mata Kuliah Pancasila, Universitas Bandar Lampung

JL.Z.A. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email: syifajihann@gmail.com, radittsalto@gmail.com, muhammadnabilaltamis0@gmail.com

ABSTRACT

Anti-coruption education is one of the importement elements in building the character and intergrity of the younger generation, Given the negative impact of corruption that damages the country social, economic, and political order, this education serves as an effective preventive effort to avoid corrupt pratices in the future . This paper aims to explore the concept of anticorruptions education and its role in stilling intergrity values in the younger generation, as well as the challenges and implementions strategies, The concept of anti corruptions education involves teaching values such as etchis, honesty, responsibility, and consistency, which must be instilled from an early age, This education should be implemented consistently, through both formal and non-formal curricula, involving educators, government, and society. Challenges in its implementation include the lack of awareness and understanding, as well as the entrenched culture of corruption in various sectors. Therefore, strategic efforts such as utilizing technology, social media, and collaboration between educational institutions and civil society organizations are needed. Through effective anti-corruption education, it is expected to create a generation with strong integrity, capable of preventing corruption, and contributing to the development of a clean and transparent nation.

Keywords: Anti-Corruption Education, Integrity, Young Generation

ABSTRAK

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu element penting dalam membangun karakter dan menanamkan nilai intergritas pada generasi muda, Mengingat dampak negatif korupsi yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara, Pendidikan ini menjadi sarana preventif yang efektif untuk menghindari praktik korupsi di masa depan Paper ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan antikorupsi serta perannya daloam menanamkan nilai intergritas pada generasi muda, temasuk tantangan dan strategi implementasinya. Konsep pendidikan antikorupsi melibatkan pengajaran nilai – nilai seperti etika, kejujuran, tanggung jawab, dan konsisten melalui kurikulum formal maupun non- formal, serta melibatkan berbagai pihak seperti, Pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan ini, serta budaya korupsi yang telah mengakar dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karna itu, diperlukan strategi implementasi yang efektif seperti pemanfaatan teknologi dan media sosial, serta kerjasama antara lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Melalui Pendidikan antikorupsi yang

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

efektif, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang memiliki intergritas tinggi, mampu mencegah korupsi, berkontribusi dalam mewujudkan negara yang bersih dan transparan.

Kata kunci : Pendidikan, antikorupsi, intergritas generasi muda

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu fenomena social yang telah lama menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dampak nya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin, yakni corruptio atau corruptus, yang kemudian diadopsi ke dalam berbagai bahasa seperti bahasa inggris menjadi corruption atau corrupt, bahasa prancis menjadi corruption, serta bahasa Belanda menjadi corruptie (korruptie), yang selanjutnya masuk ke dalam Bahasa Indonesia. Dari segi makna, korupsi mengandung arti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, suap, kekurangan moral, penyimpangan dari nilai-nilai kesucian, serta tindakan-tindakan yang merendahkan atau menfitnah. Sejalan dengan pengertian tersebut, Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Selain itu, Prof. Dr. M. Uchamad Zaidun, S.H., M.Si. menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Dalam praktiknya, kasus korupsi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung meningkat dan meluas ke berbagai daerah seiring dengan penerapan otonomi daerah, sehingga praktik korupsi kini tidak hanya terpusat di Tingkat nasional tetapi juga merata hingga ke pelosok daerah.

hasan zainudin Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional,

(Jakarta:RajaGrafindoPersada),Hal,4

Dalam konteks tersebut, muncul konsep antikorupsi sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "anti" berarti melawan, menentang, dan memusuhi, sedangkan "korupsi" berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, serta penyimpangan dari nilai moral. Dengan demikian, antikorupsi dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan, sikap, maupun upaya yang bertujuan untuk melawan dan mencegah segala bentuk praktik korupsi. Antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga sebagai gerakan nyata untuk mengendalikan dan mengurangi praktik korupsi serta mendorong terbentuknya sikap tegas dalam menolak segala bentuk penyimpangan tersebut (mengutip buku *Pendidikan Antikorupsi* karya Zainudin, hlm. 7). Lebih lanjut, korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak moralitas masyarakat, menciptakan ketidakadilan sosial, serta menghambat proses pembangunan nasional. Data dari Transparency International (2023) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang relatif rendah, yang mencerminkan perlunya upaya yang lebih sistematis dan komprehensif dalam memberantas korupsi. Salah satu pendekatan yang dinilai strategis adalah melalui pendidikan antikorupsi yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam diri individu, khususnya generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang akan menentukan arah masa depan bangsa, sehingga melalui pendidikan mereka diharapkan mampu memahami dampak negatif korupsi serta memiliki komitmen kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan

sehari-hari. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat agar individu mampu menolak godaan korupsi dalam berbagai situasi. Di Indonesia, upaya penerapan pendidikan antikorupsi telah mulai dilakukan dengan mengintegrasikan materi antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan melalui kerja sama antara pemerintah, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pelatihan bagi tenaga pendidik, kurangnya bahan ajar yang relevan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan antikorupsi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang efektif harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sebagai agen pembentuk nilai. Selain itu, pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dinilai mampu memperkuat pemahaman tentang integritas karena lebih dekat dengan konteks budaya masyarakat. Di era globalisasi, pendidikan antikorupsi juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi digital agar dapat menjangkau generasi muda secara lebih luas dan relevan. Namun demikian, upaya membangun generasi berintegritas melalui pendidikan antikorupsi tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama karena masih adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat publik dan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi teladan. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara nilai-nilai yang diajarkan dengan realitas yang terjadi di lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya budaya antikorupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi salah satu solusi jangka panjang yang penting dalam upaya membangun generasi berintegritas dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber akademik, laporan kebijakan, serta dokumen resmi terkait implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia. Sumber-sumber yang dianalisis mencakup jurnal ilmiah, buku, serta laporan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan organisasi internasional (Hidayat, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk menggali berbagai teori dan praktik terbaik terkait pendidikan antikorupsi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi tantangan, strategi, dan peran berbagai aktor dalam implementasi pendidikan antikorupsi (Andika, 2021). Selain itu, penelitian ini juga membahas penerapan kurikulum pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas pendidikan antikorupsi dalam membangun generasi yang berintegritas.

Rumusan Masalah:

1. Konsep Pendidikan Antikorupsi
2. Apa peranan Pendidikan anti korupsi dalam membangun generasi berintergritas
3. Tantangan dan strategi implementasi Pendidikan antikorupsi

Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penanaman nilai integritas pada generasi muda sebagai upaya pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan individu memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, serta meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan mutu akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berintegritas (mengutip buku *Pendidikan Antikorupsi* karya Zainudin Hasan, hlm. 9). Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter jujur, bertanggung jawab, dan beretika pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pendidikan dalam memperkuat karakter dan perilaku yang mendukung perkembangan peradaban bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi menjadi salah satu upaya strategis untuk menanamkan kesadaran dan sikap menolak segala bentuk praktik korupsi. Melalui artikel ini, diharapkan pembaca dapat memahami strategi dan implementasi pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Saat ini, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian penting dalam kurikulum bagi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan, agar memiliki pemahaman bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dicegah dan diberantas.

PEMBAHASAN

1. KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu pendekatan strategis yang sangat penting dalam membangun karakter dan integritas di kalangan generasi muda. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan mengenai peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, tetapi juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku berintegritas. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki pemahaman yang kokoh mengenai bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam kehidupan mereka, baik dalam lingkup pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Nilai dapat dipahami sebagai konsep-konsep abstrak yang terdapat dalam diri manusia dan masyarakat, berkaitan dengan penilaian terhadap hal-hal yang dianggap baik, buruk, benar, atau salah. Kata *value*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "nilai", berasal dari bahasa Latin *valere* atau bahasa Prancis kuno *valoir*, yang memiliki makna harga (mengutip buku *Pendidikan Antikorupsi* karya Zainudin Hasan, hlm. 82). Pembahasan mengenai konsep integritas memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami inti dari integritas itu sendiri dan gagasan-gagasan yang mendasarinya. Dengan pemahaman yang jelas tentang konsep ini, generasi muda dapat menyadari mengapa integritas sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Integritas dapat dipahami sebagai pola pikir, sikap, dan gerakan hati nurani seseorang yang terefleksikan dalam ucapan, tindakan, dan perilaku mereka. Ciri-ciri integritas mencakup kejujuran, konsistensi, komitmen, objektivitas, keberanian untuk bersikap, kesiapan untuk menghadapi risiko, serta disiplin dan tanggung jawab.

Perilaku yang mencerminkan integritas meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

a) kejujuran;

b) konsistensi antara ucapan dan tindakan;

c) kepatuhan terhadap peraturan dan etika organisasi;

d) komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip yang diyakini benar;

e) tanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan risiko yang diambil;

f) kualitas individu yang layak mendapatkan rasa hormat dari orang lain;

g) kepatuhan yang konsisten terhadap nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat; dan

h) kebijaksanaan dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.

(Mengutip buku *Pendidikan Antikorupsi* karya Zainudin Hasan, hlm. 86).

Pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar prinsip-prinsip antikorupsi dapat diterima dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat dasar, pendidikan antikorupsi dapat diperkenalkan melalui pembelajaran tentang kejujuran, menghargai hak orang lain, dan pentingnya sikap transparansi. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan ini dapat lebih difokuskan pada pemahaman tentang dampak korupsi terhadap negara dan masyarakat serta peran setiap individu dalam mencegahnya. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi harus dijalankan secara berkesinambungan dengan pendekatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak maupun mahasiswa. Dampak negatif korupsi terhadap pembangunan negara sangatlah besar. Korupsi tidak hanya merusak sektor ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan politik, menciptakan ketidakadilan, dan memperburuk ketimpangan sosial. Keberlanjutan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga integritas serta menghindari praktik korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dengan menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan banyak pihak, termasuk diri sendiri dan negara secara keseluruhan. Pendidikan antikorupsi juga berfungsi untuk membentuk kesadaran kolektif di kalangan masyarakat bahwa korupsi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak fondasi ekonomi, sosial, dan politik negara. Dengan meningkatnya pemahaman tentang bahaya korupsi, diharapkan generasi muda akan lebih proaktif dalam menentang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu upaya preventif yang efektif untuk mengurangi potensi tindak pidana korupsi di masa depan dan mendorong terciptanya budaya antikorupsi di masyarakat. Pentingnya pendidikan antikorupsi tidak hanya sebatas pada penyampaian materi tentang hukum dan peraturan, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berintegritas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan generasi muda tentang tanggung jawab sosial, pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta penguatan sistem pengawasan yang dapat memastikan bahwa tidak ada celah bagi praktik korupsi. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengajak generasi muda agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang mendukung pencegahan korupsi, seperti program pengawasan dan pelaporan terhadap tindakan korupsi di masyarakat. Sebagai penutup, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum akan membantu menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara

akademik, tetapi juga memiliki komitmen terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas. Dengan upaya yang konsisten dan terencana, diharapkan pendidikan antikorupsi dapat membentuk individu-individu yang memiliki karakter kuat, berintegritas tinggi, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan negara yang bebas dari praktik korupsi.

2. PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMANGUN GENERASI BERINTERGRITAS

Pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Proses pendidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dapat mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya perilaku jujur, transparan, dan adil dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks pribadi, hal ini membantu mereka memahami bahwa perilaku koruptif bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan moral dan etika yang menjadi dasar masyarakat yang adil. Sementara itu, dalam konteks profesional, nilai-nilai integritas ini sangat penting dalam membangun karier dan reputasi yang baik. Pendidikan antikorupsi, jika diterapkan dengan tepat, akan menjadikan integritas sebagai dasar dalam setiap tindakan dan keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja.

Perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam upaya pembentukan integritas tersebut. Sebagai ruang pembentukan intelektual dan karakter, kampus menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum, baik melalui mata kuliah khusus maupun penguatan nilai etika dalam setiap disiplin ilmu, dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya integritas dalam kehidupan akademik dan profesional.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus tidak terlepas dari visi dan misi lembaga pendidikan mereka. Selain itu, partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, selaras dengan posisi mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat lainnya (Zainudin Hasan, hlm. 147; Afifah dkk., 2019, “Peran Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi”, *UNES Law Review*, Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2622-2045, hlm. 213).

Selain melalui pembelajaran formal, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi juga dapat diwujudkan melalui budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika publik. Praktik antiplagiarisme, transparansi dalam penilaian, serta keteladanan dosen dan pimpinan institusi menjadi contoh nyata yang membentuk sikap mahasiswa. Lingkungan akademik yang berintegritas akan membiasakan generasi muda untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap peran yang mereka jalani.

Kegiatan kemahasiswaan turut menjadi sarana efektif dalam internalisasi nilai-nilai antikorupsi. Organisasi mahasiswa, diskusi publik, kampanye sosial, dan program pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap isu integritas dan tata kelola yang bersih. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa belajar bahwa nilai-nilai antikorupsi bukan hanya sebatas wacana, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat.

Dalam jangka panjang, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi berkontribusi pada lahirnya generasi muda yang memiliki komitmen kuat terhadap etika publik. Lulusan yang berintegritas diharapkan mampu menjadi agen perubahan di berbagai sektor, baik sebagai pemimpin, profesional, maupun warga negara yang aktif. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi bukan hanya merupakan investasi moral, tetapi juga strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan pendidikan antikorupsi, perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi akademiknya, tetapi juga mengambil peran nyata dalam membangun masa depan bangsa yang bersih dari praktik koruptif. Integritas generasi muda yang terbentuk sejak bangku kuliah menjadi harapan utama bagi terciptanya masyarakat yang beretika dan berkeadilan.

3. TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Implementasi pendidikan antikorupsi memang menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman tentang urgensi pendidikan ini di kalangan sebagian besar masyarakat dan pendidik itu sendiri. Tidak semua pendidik menyadari bahwa pendidikan antikorupsi seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum yang diajarkan, bukan sekadar topik tambahan atau mata pelajaran terpisah. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan bagi pendidik agar mereka dapat menyampaikan pendidikan antikorupsi dengan cara yang menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh siswa. Tanpa adanya pemahaman yang jelas tentang urgensi dan metode pengajaran yang tepat, pendidikan antikorupsi sulit diterima dengan baik oleh generasi muda.

Jelas tentang urgensi dan metode pengajaran yang tepat, pendidikan antikorupsi sulit diterima dengan baik oleh generasi muda.

Tantangan lainnya yang cukup besar adalah budaya korupsi yang telah mendarah daging dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Praktik-praktik koruptif yang terjadi di sekeliling mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sering kali menjadi hal yang dianggap normal atau bahkan dibenarkan. Ketika generasi muda terpapar pada lingkungan yang koruptif, maka pendidikan antikorupsi yang mereka terima dapat kehilangan dampaknya atau bahkan menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus diterapkan secara menyeluruh dan, di luar pendidikan formal, perlu ada dukungan dari lingkungan sosial mereka.

Keterlibatan orang tua, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa generasi muda memperoleh contoh nyata tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan antikorupsi adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program-program pendidikan ini secara optimal. Beberapa sekolah mungkin kekurangan tenaga pengajar yang terlatih atau fasilitas untuk memberikan pendidikan antikorupsi yang berkualitas.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pendidik melalui pelatihan yang relevan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan materi dan sumber daya yang dapat memfasilitasi pengajaran nilai-nilai antikorupsi di berbagai tingkatan pendidikan.

Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, strategi implementasi pendidikan antikorupsi harus melibatkan metode yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui penggunaan media sosial, teknologi, dan platform digital yang sering digunakan oleh kalangan muda.

Media sosial, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pendidikan antikorupsi secara lebih interaktif dan kreatif, seperti melalui video, infografis, dan diskusi daring. Hal ini memungkinkan materi pendidikan antikorupsi menjangkau audiens yang lebih luas dan mudah

diakses kapan saja dan di mana saja. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitasnya.

Selain memanfaatkan media sosial, strategi lainnya adalah dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam bidang antikorupsi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya (*workshop*) yang dapat diikuti oleh siswa, pendidik, serta masyarakat umum.

Kegiatan semacam ini akan membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu korupsi dan bagaimana cara menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan dan diskusi, pendidikan antikorupsi dapat lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik dan masyarakat luas, serta memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku sosial.

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan antikorupsi membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui kolaborasi yang sinergis dan penggunaan strategi yang tepat, pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif dan membantu membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Sebagai hasilnya, pendidikan ini dapat menjadi salah satu upaya penting dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan di masa depan.

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pendidik, diperlukan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan materi dan sumber daya yang dapat memfasilitasi pengajaran nilai-nilai antikorupsi di berbagai tingkatan pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi implementasi pendidikan antikorupsi harus melibatkan metode yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui penggunaan media sosial, teknologi, dan platform digital yang sering digunakan oleh kalangan muda. Media sosial, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pendidikan antikorupsi secara lebih interaktif dan kreatif, seperti melalui video, infografis, dan diskusi daring. Hal ini memungkinkan materi pendidikan antikorupsi menjangkau audiens yang lebih luas dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitasnya.

Selain memanfaatkan media sosial, strategi lainnya adalah dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam bidang antikorupsi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya (*workshop*) yang dapat diikuti oleh siswa, pendidik, serta masyarakat umum.

Kegiatan semacam ini akan membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu korupsi dan cara menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan dan diskusi, pendidikan antikorupsi dapat lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik dan masyarakat luas, serta memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku sosial. Secara keseluruhan, implementasi pendidikan antikorupsi membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui kolaborasi yang sinergis dan penggunaan strategi yang tepat, pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif dan

membantu membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Sebagai hasilnya, pendidikan ini dapat menjadi salah satu upaya penting dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan di masa depan.

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pendidik, diperlukan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan materi dan sumber daya yang dapat memfasilitasi pengajaran nilai-nilai antikorupsi di berbagai tingkatan pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, strategi implementasi pendidikan antikorupsi harus melibatkan metode yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui penggunaan media sosial, teknologi, dan platform digital yang sering digunakan oleh kalangan muda. Media sosial, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pendidikan antikorupsi secara lebih interaktif dan kreatif, seperti melalui video, infografis, dan diskusi daring. Hal ini memungkinkan materi pendidikan antikorupsi menjangkau audiens yang lebih luas dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.

Pendekatan berbasis teknologi juga dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitasnya. Selain memanfaatkan media sosial, strategi lainnya adalah dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam bidang antikorupsi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya (*workshop*) yang dapat diikuti oleh siswa, pendidik, serta masyarakat umum.

Kegiatan semacam ini akan membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu korupsi dan cara menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan dan diskusi, pendidikan antikorupsi dapat lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik dan masyarakat luas, serta memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku sosial.

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan antikorupsi membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui kolaborasi yang sinergis dan penggunaan strategi yang tepat, pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif dan membantu membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Sebagai hasilnya, pendidikan ini dapat menjadi salah satu upaya penting dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan di masa depan.

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pendidik, diperlukan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan materi dan sumber daya yang dapat memfasilitasi pengajaran nilai-nilai antikorupsi di berbagai tingkatan pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, strategi implementasi pendidikan antikorupsi harus melibatkan metode yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda.

Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui penggunaan media sosial, teknologi, dan platform digital yang sering digunakan oleh kalangan muda. Media sosial, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pendidikan antikorupsi secara lebih interaktif dan kreatif, seperti melalui video, infografis, dan diskusi daring. Hal ini memungkinkan materi

pendidikan antikorupsi menjangkau audiens yang lebih luas dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.

Pendekatan berbasis teknologi juga dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitasnya. Selain memanfaatkan media sosial, strategi lainnya adalah dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam bidang antikorupsi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya (*workshop*) yang dapat diikuti oleh siswa, pendidik, serta masyarakat umum.

Kegiatan semacam ini akan membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu korupsi dan cara menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan dan diskusi, pendidikan antikorupsi dapat lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik dan masyarakat luas, serta memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku sosial.

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan antikorupsi membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui kolaborasi yang sinergis dan penggunaan strategi yang tepat, pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif dan membantu membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Sebagai hasilnya, pendidikan ini dapat menjadi salah satu upaya penting dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan di masa depan.

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pendidik, diperlukan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan materi dan sumber daya yang dapat memfasilitasi pengajaran nilai-nilai antikorupsi di berbagai tingkatan pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, strategi implementasi pendidikan antikorupsi harus melibatkan metode yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui penggunaan media sosial, teknologi, dan platform digital yang sering digunakan oleh kalangan muda. Media sosial, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pendidikan antikorupsi secara lebih interaktif dan kreatif, seperti melalui video, infografis, dan diskusi daring. Hal ini memungkinkan materi pendidikan antikorupsi menjangkau audiens yang lebih luas dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.

Pendekatan berbasis teknologi juga dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitasnya. Selain memanfaatkan media sosial, strategi lainnya adalah dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam bidang antikorupsi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya (*workshop*) yang dapat diikuti oleh siswa, pendidik, serta masyarakat umum.

Kegiatan semacam ini akan membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu korupsi dan cara menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan dan diskusi, pendidikan antikorupsi dapat lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik dan masyarakat luas, serta memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku sosial.

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan antikorupsi membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat

secara keseluruhan. Melalui kolaborasi yang sinergis dan penggunaan strategi yang tepat, pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif dan membantu membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Sebagai hasilnya, pendidikan ini dapat menjadi salah satu upaya penting dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan di masa depan. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pendidik, diperlukan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan materi dan sumber daya yang dapat memfasilitasi pengajaran nilai-nilai antikorupsi di berbagai tingkatan pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, strategi implementasi pendidikan antikorupsi harus melibatkan metode yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui penggunaan media sosial, teknologi, dan platform digital yang sering digunakan oleh kalangan muda. Media sosial, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pendidikan antikorupsi secara lebih interaktif dan kreatif, seperti melalui video, infografis, dan diskusi daring. Hal ini memungkinkan materi pendidikan antikorupsi menjangkau audiens yang lebih luas dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitasnya. Selain memanfaatkan media sosial, strategi lainnya adalah dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam bidang antikorupsi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya (*workshop*) yang dapat diikuti oleh siswa, pendidik, serta masyarakat umum. Kegiatan semacam ini akan membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu korupsi dan cara menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan dan diskusi, pendidikan antikorupsi dapat lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik dan masyarakat luas, serta memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku sosial.

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan antikorupsi membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui kolaborasi yang sinergis dan penggunaan strategi yang tepat, pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif dan membantu membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Sebagai hasilnya, pendidikan ini dapat menjadi salah satu upaya penting dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan di masa depan.

KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi yang berintegritas, terutama di negara-negara yang menghadapi tantangan besar terkait dengan praktik korupsi. Upaya mendidik generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai moral, kejujuran, dan transparansi merupakan langkah preventif yang efektif untuk menanggulangi perilaku koruptif di masa depan. Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya korupsi, tetapi juga untuk membentuk karakter individu yang memiliki komitmen terhadap integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, pendidikan antikorupsi bukan hanya soal pengajaran tentang hukum dan peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi, tetapi juga tentang pembentukan sikap dan karakter anak bangsa yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan pendidikan antikorupsi yang efektif dan komprehensif, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang

tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas tinggi yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi muda yang berintegritas, khususnya di tengah tantangan korupsi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Melalui pendidikan ini, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan dapat ditanamkan sejak dini sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter individu. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep dan regulasi terkait korupsi, tetapi juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual, pendidikan antikorupsi merupakan proses internalisasi nilai moral dan etika yang dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Implementasi nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting agar generasi muda tidak hanya memahami bahaya korupsi secara teoritis, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk menolak segala bentuk penyimpangan. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana strategis untuk membentuk kesadaran kritis serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peran pendidikan antikorupsi dalam membangun generasi berintegritas juga terlihat melalui kontribusi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dalam menciptakan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika. Melalui integrasi kurikulum, budaya akademik, serta berbagai kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa dapat dibentuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam mencegah dan melawan praktik korupsi di berbagai sektor kehidupan.

Namun demikian, implementasi pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya pendidikan, serta kuatnya budaya korupsi yang telah mengakar. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, seperti peningkatan kapasitas pendidik, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Pendekatan yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman akan meningkatkan efektivitas pendidikan antikorupsi dalam menjangkau generasi muda.

Pada akhirnya, pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa. Dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat terbentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas tinggi, berani bersikap, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, N., dkk. (2019). Peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi. *UNES Law Review, 2*(1), 213–221.

Andika. (2021). Implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter, 12*(2), 88–97.

Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum nasional dan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasan, Z. (2023). *Pendidikan antikorupsi*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Bandar Lampung.

Hidayat, R. (2022). Strategi implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, 10*(3), 112–123.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2020). *Panduan implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: KPK.

Klitgaard, R. (2001). *Membasmi korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.

Mulyasa. (2016). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurdin, A. (2020). Pendidikan karakter berbasis integritas dalam membangun generasi antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 8*(2), 56–68.

Prasetyo, A. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia, 14*(1), 45–53.

Suyanto. (2010). *Urgensi pendidikan karakter dalam membangun bangsa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wibowo, A. (2013). *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana.